



RENCANA KERJA (*RENJA*) TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 Ayat (4), Pasal 264 Ayat (2) dan Pasal 265 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- b. bahwa untuk menjaga konsistensi arah pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kesiapan yang matang dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempunyai fungsi membantu Bupati dalam merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Unit kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD

adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan MUSRENBANG adalah musyawarah stakeholder untuk mematangkan rancangan RKPD berdasarkan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah hasil Forum Organisasi Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebelum disepakati oleh DPRD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Organisasi Perangkat Daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan tahun 2026.
- (2) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam menyusun :
 - a. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - c. Rancangan APBD tahun anggaran 2026 dan perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2026; dan
 - d. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggunakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
- b. OPD menggunakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan anggaran OPD dengan DPRD.

Pasal 5

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator hasil outcome masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisa dan evaluasi terhadap usulan program dan kegiatan tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

Pasal 6

Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

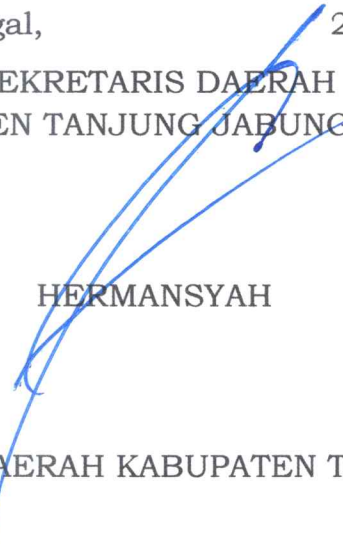
Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 30 JUNI 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut, penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 disusun paling lambat dua minggu setelah RKPD di tetapkan.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini menjadi bahan untuk penetapan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

Kuala Tungkal, Agustus 2025

**Plt. Kepala Bappeda
Kab. Tanjung Jabung Barat**



FERI NOPRIANTO, SE

Pembina Tk.I

NIP. 19731116 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.2 Landasan Hukum.....	2
1.1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	5
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).....	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	14
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	17
BAB III TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda.....	18
3.3 Program dan Kegiatan.....	19
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23
BAB IV PENUTUP	28



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Unit SKPD adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki dan di dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Pengembangan kabupaten tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Untuk mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan pembangunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah dokumen

perencanaan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode tahun 2025, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Bappeda merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renja SKPD mengacu kepada RKPD yang telah dibuat, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri republik indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi pemutakhhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 11);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
 13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
 14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Tahun 2022 Nomor 14);
 15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 17).

16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 11).
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Bappeda disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 merupakan evaluasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberhasilan Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kab. Tanjab Barat. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan tahun 2024 serta perkiraan tahun 2025 di jabarkan dalam Tabel TC. 29 sebagai berikut :

Tabel TC. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Sampai dengan Tahun 2024

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan tahun 2025	Perkiraan Maju Tahun 2026	
						Target Renja Bappeda tahun 2024	Realisasi Renja Bappeda Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan kantor	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%
	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	59	11	11	11	100 %	15	15	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	6	6	6	100 %	6	6	100 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	155	31	31	31	100 %	31	31	100 %
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	10	2	2	2	100 %	2	2	100 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	826	162	170	170	100 %	170	170	100 %
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Orang	100	20	20	20	100 %	20	20	100 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
	Penyediaan Kompon Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompon Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	72	12	12	12	100 %	12	12	100 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	50	10	10	10	100 %	10	10	100 %
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	120	20	20	20	100 %	20	20	100 %
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	146	25	25	25	100 %	25	25	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100 %	12	12	100 %
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100 %	12	12	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Unit	180	30	30	30	100 %	30	30	100 %

			Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	900	150	150	150	100 %	150	150	100 %
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara konsultasi publik	Berita Acara	10	2	2	2	100 %	2	2	100 %
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	4	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	8	1	2	2	100 %	3	3	100 %
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	1935	315	495	495	100 %	319	319	100 %
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	6	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	10	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah	%	100%	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	19	4	5	5	100 %	5	5	100 %
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	28	7	7	7	100 %	7	7	100 %
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintaha Daerah di Bidang Pembangunan Daerah PemerintahKabupaten/Kota	Dokumen	4	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah	%	95	92	94	94	94 %	95	95	95 %
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia	%	92	92	92	92	92 %	92	92	92 %
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	PD	85	17	17	17	100 %	17	17	100 %
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	PD	45	9	9	9	100 %	9	9	100 %
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	95	92	94	94	94%	95	95	95 %
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	PD	10	10	10	10	100 %	10	10	100 %
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	2	2	100 %	2	2	100 %

				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayah	%	95	92	94	94	94 %	95	95	95 %
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	17	4	4	4	100 %	4	4	100 %
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	PD	10	2	2	2	100 %	2	2	100 %
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	7	2	1	1	100 %	1	1	100 %
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	PD	30	6	6	6	100 %	6	6	100 %
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks inovasi daerah	Inovasi	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data inovasi daerah	>	>20	0	>20	>20	100 %	>20	>20	100 %
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Laporan	1	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Dokumen	3	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	3	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah	>	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	51.29 >	100 %
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	1	1	1	100 %	1	1	100 %
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	3	1	1	1	100 %	1	1	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai Urusan Pemerintahan pada posisi untuk mendukung dan menunjang misi IV yaitu **Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik**, dengan tujuan mewujudkan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan, maka bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempedomani indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dengan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 2 indikator kinerja sasaran sebagai penunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target IKU.

Diskripsi operasional indikator kinerja 1 : Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IK\ 1 = \frac{IK\ 1.1 + IK\ 1.2 + IK\ 1.3}{3}$$

Dimana :

IK 1 adalah indikator kinerja Capaian kinerja sesuai perencanaan,

IK 1.1 adalah pencapaian Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu

IK 1.2 adalah pencapaian terhadap pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu

IK 1.3 adalah pencapaian terhadap pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan

Indikator 1.1 Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu, merupakan indikator outcome program di hitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 1.1 = \frac{\text{realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}} \times 100\%$$

Indikator 1.2 Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 1.2 = \frac{\text{realisasi dokumen}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}} \times 100\%$$

Indikator 1.3 Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 1.3 = \frac{\text{realisasi evaluasi}}{\text{jumlah evaluasi yang harus dikerjakan}} \times 100\%$$

Diskripsi operasional indikator kinerja 2 : Persentase keselarasan dokumen perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IK\ 2 = \frac{IK\ 2.1+IK\ 2.2+IK\ 2.3}{3}$$

Dimana :

- IK 2 adalah indikator kinerja 2 Persentase keselarasan dokumen perencanaan
- IK 2.1 adalah indikator 2.1 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- IK 2.2 adalah indikator 2.2 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan
- IK 2.3 adalah indikator 2.3 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah.

Indikator 2.1 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 2.1 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi, sda}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi, sda}}$$

Keselarasn dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 1 sub bidang antara lain lingkup subbid perekonomian.

Indikator 2.2 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$IK\ 2.2 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sospem}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sospem}}$$

Keselarasn dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan

Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 2 sub bidang antara lain lingkup subbid Pemerintahan 17 perangkat daerah, lingkup subbid Pembangunan Manusia 9 perangkat daerah.

Indikator 2.3 Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan, dihitung menggunakan formulasi :

$$IK\ 2.3 = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarpras}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid Kewilayahan 6 perangkat daerah.

Diskripsi operasional indikator kinerja 3 : Persentase ketersediaan dan informasi yang valid dan terbaru, dihitung dengan formulasi :

$$IK\ 3 = \frac{\text{jumlah output dokumen data informasi}}{\text{jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

Dimana :

Jumlah output dokumen data informasi adalah jumlah dokumen dari keluaran kegiatan dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan.

Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dokumen dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang direncanakan.

Diskripsi operasional indikator kinerja 4 Persentase pemanfaatan hasil penelitian, dihitung dengan formulasi :

$$IK\ 4 = \frac{\text{jumlah penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah penelitian yang direncanakan}} \times 100\%$$

Dimana :

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang di tindaklanjuti.

Jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang direncanakan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun dan ditetapkan dengan Perda.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan jangka waktu 5 tahun dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan jangka waktu 1 tahun dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut diatas, dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mempunyai tugas menyusun RKPD, Renja PD dan KUA PPAS. Dalam hal pelaksanaannya Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan RKPD
 - a. Melakukan Penyusunan Rancangan Awal sampai Rancangan Akhir RKPD di koordinasikan dengan OPD lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Melaksanakan Konsultasi Publik.
 - c. Melaksanakan musrenbang RKPD dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten dan mengikuti Musrenbang Tingkat Provinsi dan Nasional.
 - d. Menyelaraskan Prioritas dan sasaran Pembangunan tahunan daerah serta kegiatan prioritas utama dengan mengacu pada RPJM.

- e. Membahas Rencana Program Kegiatan bersama seluruh OPD.
 - f. Melakukan evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan.
 - g. Menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- a. Melakukan Penyusunan Rancangan awal sampai Rancangan Akhir Renja Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - b. Mengkoordinir Penyusunan Rancangan awal sampai Rancangan Akhir Renja PD lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - c. Melakukan Asistensi dan verifikasi Renja PD lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - d. Melakukan evaluasi Renja PD tahun lalu dan tahun berjalan lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - f. Menyampaikan Rancangan Akhir Renja PD hasil verifikasi lingkup wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Kepala Daerah untuk memperoleh pengesahan.

Hasil Review Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan disajikan pada matriks rancangan Renja BAPPEDA tahun 2026 dan analisis Kebutuhan berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Rancangan Awal Renja Tahun 2026			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
			Lokasi	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Lokasi	Target	Pagu Anggaran (Rp)	
4	5	6	7	8	9	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran lingkup Bappeda	%	Bappeda	100%	12.045.000.000	Bappeda	100%	12.045.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda	%	Bappeda	100%	470.000.000	Bappeda	100%	470.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Bappeda	11	370.000.000	Bappeda	11	370.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Bappeda	6	100.000.000	Bappeda	6	100.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD	%	Bappeda	100%	6.500.000.000	Bappeda	100%	6.500.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bln/Org	Bappeda	31	5.000.000.000	Bappeda	31	5.000.000.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Bappeda	1	1.450.000.000	Bappeda	2	1.450.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Bappeda	2	50.000.000	Bappeda	1	50.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	Bappeda	100%	300.000.000	Bappeda	100%	300.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Bappeda	170	100.000.000	Bappeda	170	100.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Bappeda	20	200.000.000	Bappeda	20	200.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	Bappeda	100%	2.270.000.000	Bappeda	100%	2.270.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Bappeda	12	70.000.000	Bappeda	12	70.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Bappeda	12	130.000.000	Bappeda	12	130.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Bappeda	12	400.000.000	Bappeda	12	400.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Bappeda	12	80.000.000	Bappeda	12	80.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	Bappeda	12	90.000.000	Bappeda	12	90.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Bappeda	12	1.500.000.000	Bappeda	12	1.500.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Bappeda	100	1.080.000.000	Bappeda	100	1.080.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit	Bappeda	10	520.000.000	Bappeda	10	520.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Bappeda	20	60.000.000	Bappeda	20	60.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Bappeda	25	500.000.000	Bappeda	25	500.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Bappeda	100	325.000.000	Bappeda	100	325.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Bappeda	12	195.000.000	Bappeda	12	195.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	Bappeda	12	130.000.000	Bappeda	12	130.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	Bappeda	100	1.100.000.000	Bappeda	100	1.100.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Bappeda	30	550.000.000	Bappeda	30	550.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Bappeda	150	250.000.000	Bappeda	150	250.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Bappeda	1	300.000.000	Bappeda	1	300.000.000	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	%	Bappeda	100%	1.950.000.000	Bappeda	100%	1.950.000.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan	%	Bappeda	100%	970.000.000	Bappeda	100%	970.000.000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara konsultasi publik	Berita Acara	Bappeda	1	130.000.000	Bappeda	1	130.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Bappeda	1	135.000.000	Bappeda	1	135.000.000	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita	Bappeda	1	155.000.000	Bappeda	1	155.000.000	

		Acara							
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Bappeda	315	550.000.000	Bappeda	315	550.000.000	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah	%	Bappeda	100%	500.000.000	Bappeda	100%	500.000.000	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian PerencanaanDan PelaksanaanPembangunan	Laporan	Bappeda	1	200.000.000	Bappeda	1	200.000.000	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Bappeda	1	300.000.000	Bappeda	1	300.000.000	
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah	%	Bappeda	100%	480.000.000	Bappeda	100%	480.000.000	
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Bappeda	5	100.000.000	Bappeda	1	100.000.000	
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Dokumen	Bappeda	7	280.000.000	Bappeda	0	280.000.000	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Bappeda	1	100.000.000	Bappeda	0	100.000.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah	%	Bappeda	95%	2.188.000.000	Bappeda	95%	2.188.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia	%	Bappeda	92%	698.000.000	Bappeda	92%	698.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Bappeda	1	180.000.000	Bappeda	1	180.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Bappeda	17	110.000.000	Bappeda	17	110.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah BidangPemerintahan	Laporan	Bappeda	4	8.000.000	Bappeda	4	8.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Bappeda	1	285.000.000	Bappeda	1	285.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Bappeda	9	110.000.000	Bappeda	9	110.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Bappeda	4	5.000.000	Bappeda	4	5.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	Bappeda	95%	660.000.000	Bappeda	95%	660.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Bappeda	1	150.000.000	Bappeda	1	150.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Bappeda	10	85.000.000	Bappeda	10	85.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Bappeda	4	5.000.000	Bappeda	4	5.000.000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Bappeda	2	340.000.000	Bappeda	2	340.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Bappeda	1	75.000.000	Bappeda	1	75.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil PelaksanaanMonitoring dan Evaluasi Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Bappeda	4	5.000.000	Bappeda	4	5.000.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	%	Bappeda	95%	830.000.000	Bappeda	95%	830.000.000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Bappeda	4	300.000.000	Bappeda	4	300.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Bappeda	2	65.000.000	Bappeda	2	65.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil PelaksanaanMonitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Bappeda	4	5.000.000	Bappeda	4	5.000.000	

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Bappeda	1	380.000.000	Bappeda	1	380.000.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Bappeda	6	75.000.000	Bappeda	6	75.000.000	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Bappeda	4	5.000.000	Bappeda	4	5.000.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks inovasi daerah		Bappeda	Sangat Inovatif	755.000.000	Bappeda	Sangat Inovatif	755.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data inovasi daerah		Bappeda	>20	285.000.000	Bappeda	>20	285.000.000	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan aik	Laporan	Bappeda	1	285.000.000	Bappeda	1	285.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi Dan pembangunan	Dok	Bappeda	1	225.000.000	Bappeda	1	225.000.000	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	Bappeda	1	225.000.000	Bappeda	1	225.000.000	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah		Bappeda	51.29>	245.000.000	Bappeda	51.29>	245.000.000	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	Bappeda	1	120.000.000	Bappeda	1	120.000.000	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	Bappeda	1	125.000.000	Bappeda	1	125.000.000	
					16.938.000.000			16.183.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. dalam melaksanakan tugas tersebut berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Untuk Program dan kegiatan usulan masyarakat diserahkan ke SKPD teknis karena sifat Bappeda adalah koordinator.

Adapun rencana program Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026, sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
4. Program penelitian dan pengembangan daerah



BAB III

TUJUAN, SASARAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan Negara melalui penciptaan system pengawasan dan keseimbangan (*checks and balancing*). Fungsi-fungsi tersebut adalah: (i) penguatan perencanaan dan penganggaran; (ii) pengumpulan pendapatan terpadu (*revenue collection*); (iii) penguatan kapasitas kebijakan fiskal; serta (iv) penguatan kapasitas perbendaharaan (*treasury*).

Berpijak dari uraian tersebut diatas kebijakan nasional yang sudah ditetapkan adalah peningkatan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah dengan strategi meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan; terwujudnya system pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional tersebut Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjalankan fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan program dan kegiatan antara lain :

1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan Perubahan RKPD tahun 2025.
2. Menyusun Rencana Kerja Bappeda tahun 2026 dan perubahan Rencana Kerja Bappeda tahun 2025 serta Koordinator penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 dan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.
3. Melakukan Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 dan Pelaksanaan tahun 2025 serta Evaluasi Dokumen Perencanaan tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Tanjung Jabung Barat dan dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 belum disusun, maka perumusan tujuan dan sasaran Bappeda disusun berdasarkan tupoksi dan numenklatur program kegiatan yang tertuang di keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020. Untuk tahap selanjutnya diselaraskan dengan renstra Bappeda tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 diuraikan dalam tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	Indeks	83.97
			Tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan	%	100
			Nilai AKIP Bappeda	Indeks	78
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan	Persentase capaian kinerja sesuai Perencanaan	%	96
			Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	%	95
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	18

3.3 Program dan Kegiatan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah dijabarkan di atas, Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 menjalankan program yang didukung kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang didukung dengan kegiatan :
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- D. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang didukung dengan kegiatan :
- A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan :
- Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

- B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- D. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang di kelola
 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- 3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang didukung dengan kegiatan :
 - A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
4. Program penelitian dan pengembangan daerah, yang didukung dengan kegiatan :
- A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, dengan sub kegiatan :
- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
- C. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- D. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana telah di tuangkan dalam bab sebelumnya, maka perlu di susun rencana kerja dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam pencapaian masing-masing sasaran. Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 dikelompokkan sesuai sasaran dan sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN 1.1. Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan

Indikator kinerja dari sasaran tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 87 dan tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 100 %, Serta indikator Nilai AKIP Bappeda dengan target kinerja tahun 2026 sebesar 83, yang akan di capai dengan melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 12.520.000.000.

SASARAN STRATEGIS 2. Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan

Sasaran Strategis ini terdiri dari dua Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan Persentase Keselarasan dokumen perencanaan.

Target kinerja tahun 2026 untuk Indikator Kinerja Utama 2.1. Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan sebesar 94 %. Untuk mewujudkan target kinerja tersebut disusun dua program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang didukung dengan 4 kegiatan dan 8 sub kegiatan dengan kebutuhan dana Rp. 1.740.000.000,00 dan untuk Indikator Kinerja Utama 2.2. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan sebesar 92 %. Yang programnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang di dukung dengan 3 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan kebutuhan dana Rp. 2.142.000.000,00 dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang didukung dengan 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 3.410.000.000,00.

Untuk Mencapai target indikator kinerja sasaran yang telah di tetapkan di atas, di butuhkan total dana sebesar Rp. 19.812.000.000,00 yang dirinci dalam rumusan rencana program dan kegiatan, sebagaimana tabel berikut ini :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Nama SKPD : Bappeda Kab. Tanjab Barat

Tujuan	Sasaran	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Rencana Tahun 2027			
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
-1-	-2-	-3-				-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah														
	Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan					Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda		87			90			
						Tingkat tindak lanjut temuan Hasil Pemeriksaan		100%			100%			
						Nilai AKIP Bappeda		83			85			
		5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran lingkup Bappeda		100%	12.520.000.000		100%	13.260.000.000
		5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan bappeda		100%	560.000.000		100%	645.000.000
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15 dokumen	450.000.000		15 dokumen	525.000.000	
					06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6 Laporan	100.000.000		6 Laporan	110.000.000	
					08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 Data	5.000.000		1 Data	5.000.000	
					11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		1 dokumen	5.000.000		1 dokumen	5.000.000	
		5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah		100%	5.450.000.000		100%	5.650.000.000
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		31 Orang/Bulan	4.900.000.000		31 Orang/Bulan	5.000.000.000	
					02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	500.000.000		1 Dokumen	600.000.000	
					08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2 Dokumen	50.000.000		2 Dokumen	50.000.000	
		5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	500.000.000		100%	520.000.000
					02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		180 Paket	150.000.000		180 Paket	150.000.000	
					09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 Orang	150.000.000		15 Orang	150.000.000	
					11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan		20 orang	200.000.000		20 orang	220.000.000	
		5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.390.000.000		100%	2.510.000.000
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	110.000.000		12 Paket	115.000.000	
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	160.000.000		12 Paket	170.000.000	
					04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	500.000.000		12 Paket	550.000.000	
					05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	80.000.000		12 Paket	85.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Rencana Tahun 2027		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-					-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
						06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	90.000.000		12 Dokumen	90.000.000
						09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	1.450.000.000		12 Laporan	1.500.000.000
		5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.315.000.000		100%	1.515.000.000
						02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan		10 Unit	835.000.000		10 Unit	935.000.000
						05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20 Unit	60.000.000		20 Unit	60.000.000
						06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		25 Unit	400.000.000		25 Unit	500.000.000
						08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		1 Unit	20.000.000		1 Unit	20.000.000
		5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.235.000.000		100%	1.290.000.000
						02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	185.000.000		12 Laporan	190.000.000
						04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		12 Laporan	1.050.000.000		12 Laporan	1.100.000.000
		5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.070.000.000		100%	1.130.000.000
						01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		30 Unit	500.000.000		30 Unit	550.000.000
						06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		150 Unit	250.000.000		150 Unit	250.000.000
						09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	320.000.000		1 Unit	330.000.000
Meningkatkan Kualitas perencanaan pembangunan daerah														
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan							Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan		94 %			95 %	
	5	01	02				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan tepat waktu		100%	1.740.000.000		100%	2.525.000.000
	5	01	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan		100%	970.000.000		100%	1.865.000.000
						03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara konsultasi publik		2 Berita Acara	130.000.000		2 Berita Acara	255.000.000
						04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah berita acara Forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah		1 Berita Acara	135.000.000		1 Berita Acara	255.000.000
						05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1 Berita Acara	155.000.000		1 Berita Acara	255.000.000
						07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		7 Dokumen	550.000.000		8 Dokumen	1.100.000.000
	5	01	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tingkat pemenuhan dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	150.000.000			
						03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		1 Buku	150.000.000			
	5	01	02	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah		100%	265.000.000		100%	280.000.000
						03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1 Laporan	265.000.000		1 Laporan	280.000.000
	5	01	02	2.04			Implementasi Sistem Informasi	Tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi		100%	355.000.000		100%	380.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Rencana Tahun 2027		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-					-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
							Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah						
					01		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Datadalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		1 Dokumen	75.000.000		1 Dokumen	100.000.000
					02		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		1 Dokumen	280.000.000		1 Dokumen	280.000.000
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Daerah														
Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan							Persentase Keselarasan dokumen perencanaan			92%			94%	
		5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah		92%	2.142.000.000		94%	2.370.000.000
		5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia		92%	725.000.000		92%	755.000.000
						01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	175.000.000		1 Dokumen	180.000.000
						02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		17 PD	100.000.000		17 PD	105.000.000
						03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		2 Laporan	35.000.000		2 Laporan	40.000.000
						05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	280.000.000		1 Dokumen	285.000.000
						06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		9 PD	100.000.000		9 PD	105.000.000
						07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2 Laporan	35.000.000		2 Laporan	40.000.000
		5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		92%	577.000.000		92%	730.000.000
						01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		1 Dokumen	100.000.000		1 Dokumen	150.000.000
						02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		10 PD	65.000.000		10 PD	85.000.000
						03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		2 Laporan	35.000.000		2 Laporan	40.000.000
						04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian		2 Laporan	290.000.000		2 Laporan	340.000.000
						05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Dokumen	52.000.000		1 Dokumen	75.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Rencana Tahun 2027		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-					-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
							Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
						07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		2 Laporan	35.000.000		2 Laporan	40.000.000
		5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Wilayah		92%	840.000.000		94%	885.000.000
						01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		4 Dokumen	270.000.000		4 Dokumen	300.000.000
						02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 PD	65.000.000		2 PD	65.000.000
						03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		2 Laporan	35.000.000		2 Laporan	40.000.000
						05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		2 Dokumen	375.000.000		2 Dokumen	380.000.000
						06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		6 PD	60.000.000		6 PD	60.000.000
						07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah		2 Laporan	35.000.000		2 Laporan	40.000.000
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah														
	Meningkatnya Keselarasan dan Capaian Kinerja Perencanaan						Persentase pemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah			18%			20%	
		5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks inovasi daerah		Inovatif	3.410.000.000		Inovatif	3.420.000.000
		5	05	02	2.01.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data inovasi daerah		>20	110.000.000		>20	115.000.000
						01	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1 Laporan	110.000.000		1 Laporan	115.000.000
		5	05	02	2.02.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan bidang sosial dan kependudukan		1 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	350.000.000
						01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		1 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	350.000.000
		5	05	02	2.03.		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi Dan pembangunan		1 Dokumen	2.775.000.000		1 Dokumen	2.600.000.000
						01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		1 Dokumen	150.000.000		1 Dokumen	350.000.000
						04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1 Dokumen	225.000.000		1 Dokumen	350.000.000
						05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan perikanan		1 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	350.000.000
						07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		1 Dokumen	200.000.000		1 Dokumen	350.000.000
						09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		2 Dokumen	2.000.000.000		1 Dokumen	1.200.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Rencana Tahun 2027		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
-1-	-2-	-3-					-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
		5	05	02	2.04.		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah		51.29 >	325.000.000		51.29 >	355.000.000
						02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Repilkasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Repilkasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		1 Laporan	200.000.000		1 Laporan	225.000.000
						04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		1 Laporan	125.000.000		1 Laporan	130.000.000
											19.812.000.000			21.575.000.000



BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Bappeda tahun 2026 merupakan tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan merupakan penyempurnaan dari rancangan akhir, yang disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Renja ini merupakan tahapan penyusunan Rencana Kerja tahunan yang memuat strategi dan kebijakan dalam Upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, yang nantinya di gunakan sebagai landasan dalam penyusunan renja Bappeda dalam tahap selanjutnya.

Kuala Tungkal, Agustus 2025

**Plt. Kepala Bappeda
Kab. Tanjung Jabung Barat**

**FERI NOPRIANTO, SE
Pembina TK.I
NIP. 19731116 200003 1 002**